



Mecca Route di Bandara Hasanuddin

Seorang petugas imigrasi Arab Saudi menyambut jemaah haji Indonesia dalam Inisiatif Rute Makkah di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Rabu (22/4/2026). Ini bertepatan dengan peresmian terminal keempat program tersebut yang memungkinkan seluruh proses, mulai dari visa elektronik, biometrik, hingga pemeriksaan imigrasi dan kesehatan, diselesaikan sejak di Tanah Air. Sehingga setibanya di Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdulaziz jemaah dapat langsung menuju akomodasi di Makkah dan Madinah tanpa antrian panjang. Berita terkait baca hal.5(spa.ist)

TIBA-TIBA SELAT MALAKA

Gaduh Kapal Perang AS Melintas hingga Ide Purbaya Pungut Pajak

Tiba-tiba Selat Malaka jadi sorotan dunia. Mulai dari segi militer, geopolitik, hingga ekonomi. Kabar yang sejak pekan lalu santer beredar adalah laporan bila Kapal perang Amerika Serikat (AS) melintas dan 'parkir' di jalur strategis ini. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut lintasan kapal militer asing di kawasan itu sah dan lazim, karena Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang terbuka bagi transit. Hal ini merupakan bagian dari freedom of navigation patrol atau patroli kebebasan navigasi yang rutin dilakukan di kawasan. Di sisi lain, mencuat ide Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menarik pungutan bagi kapal internasional yang melintasi Malakan. Gagasan itu menyeret perbandingan dengan Selat Hormuz. Bedanya, jika Hormuz menentukan denyut pasokan energi global, Selat Malaka adalah nadi perdagangan dunia, menghubungkan arus barang dari Timur Tengah ke Asia Timur. Keduanya sama-sama 'titik cekik', dengan dampak signifikan bila terjadi kebuntuan. Usulan itu langsung dimentahkan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Dia mengatakan bahwa jalur transit melalui Selat Malaka dan Singapura harus tetap gratis bagi semua pihak. Ditegaskan, negara kota tersebut tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasinya. Posisi penting selat penghubung Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan ini dipertegas dengan pernyataan penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ali Akbar Velayati. Pihaknya menyeret nama Selat Malaka ke dalam pusaran konflik dengan Amerika Serikat di tengah blokade Selat Hormuz yang diterapkan Trump usai kesepakatan damai gagal dicapai. Velayati memperingatkan bahwa 'setiap tindakan usil' akan memicu respons berantai sampai ke Selat Malaka dan Bab al-Mandab (selat yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden/Samudra Hindia). **BACA HAL 11...**

SEJARAH PEREBUTAN SELAT MALAKA



Sejak Abad ke-11:

Selat Malaka diambil alih oleh Kerajaan Majapahit untuk dijadikan gerbang pelayaran utama menuju Samudera Hindia dan Pasifik.



Awal Abad ke-15:

Di bawah kekuasaan Dinasti Ming (Cina), selat ini menjadi penghubung vital antara Laut Cina Selatan dengan negara-negara di Samudera Hindia dan Jazirah Arab.



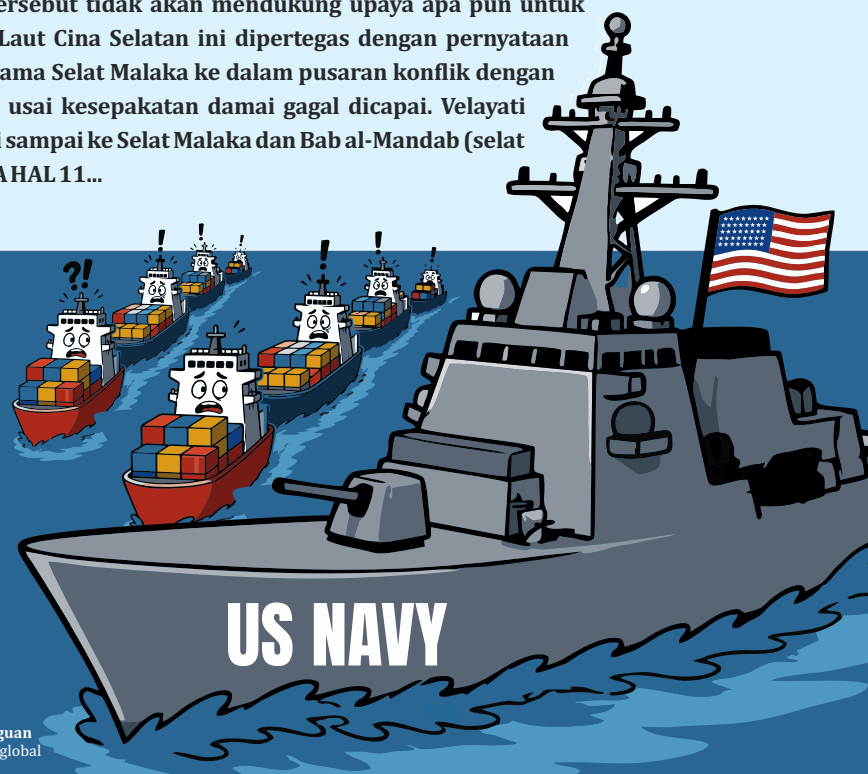
Tahun 1511:

Saat bangsa Barat mulai mencari rempah-rempah ke Nusantara, Selat Malaka menjadi area pertama yang ditaklukkan oleh Portugis.



Era Kolonial Inggris

Inggris memanfaatkan selat ini sebagai jalur utama pengangkutan rempah-rempah dari Nusantara serta jalur perdagangan antara Cina, India, dan Eropa.



US NAVY

ASPEK EKONOMI DAN ENERGI



Volume migas
16-17 juta barel
per hari



Lalu lintas
80-100 ribu kapal
per tahun



Ketergantungan
48 persen energi
Asia Timur



Risiko gangguan
rantai pasok global
kacau

MINYAKITA BAKAL TAK ADA LAGI DALAM BANTUAN PANGAN

Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran minyak goreng dalam program bantuan pangan. Ke depan, bantuan tidak lagi bergantung pada Minyakita, melainkan membuka opsi penggunaan merek lain dengan harga setara dari produsen.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut penggunaan Minyakita dalam program bantuan selama ini turut menekan pasokan di pasar.



(Arsip) Bantuan pangan beras dan minyak goreng dari pemerintah yang disalurkan ke masyarakat. (Ist)

**5 PROVINSI DENGAN
HARGA MIGOR TERTINGGI
(PER 22/4/2026)**

Sumber:BI

Gorontalo

RP 26.800

Papua

RP 25.200

Sulawesi Tenggara

RP 24.100

Papua Barat

RP 23.850

Maluku

RP 23.750

Tingginya permintaan, ditambah distribusi bantuan dalam skala besar, membuat ketersediaan di pasar tradisional berkurang dan harga terdorong naik.

"Minyakita ini terlalu populer sekarang. Semua orang belinya Minyakita. (Ditambah kemarin) ada bantuan pangan Minyakita untuk 33

juta (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) dikali dua liter. Nah, pakai Minyakita. Itu tuh kesedot, sehingga di pasar agak berkurang, sehingga harga menjadi naik," kata Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut mendorong pemerintah

mengevaluasi skema distribusi. Bantuan pangan ke depan tidak akan terpaku pada satu merek, melainkan memanfaatkan pasokan dari berbagai produsen agar keseimbangan pasar tetap terjaga.

"Nah sekarang kita akan balik. Nanti kalau bantuan kita minta merek apa saja dengan harga yang sama dari produsen, sehingga yang di pasar tradisional itu tidak berkurang," ujarnya.

Pemerintah bakal mendorong agar Bulog menjalin kerja sama dengan produsen swasta untuk menyediakan minyak goreng setara dengan Minyakita, baik dari sisi harga maupun kualitas.

"Ini cepat supply-nya kita tambah dan nanti Bulog kalau ada bantuan pangan, boleh pakai merek apa saja. Kita akan bicara dengan produsen dengan harga yang sama," ujarnya.

Ia berharap dengan kerja sama Bulog dan sektor swasta, maka stok Minyakita yang ada di pasar tak terganggu.

"Ada tambahan, sehingga tidak mengganggu minyak kita yang ada di pasar-pasar tradisional itu. Jadi udah ketemu sebabnya kenapa naik, karena ada bantuan pangan 33 juta kali 2 bulan, kali 2 liter," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan skema baru tersebut masih dibahas bersama para produsen minyak goreng. Pemerintah membuka kemungkinan penggunaan berbagai merek, bergantung pada hasil kesepakatan.

"Belum tahu nanti. Sekarang kan sebagian Minyakita. Nanti kita akan ketemu produsen. Kita cari solusinya untuk bantuan pangan. Ya bisa macam-macam nanti, tergantung kesepakatan," kata Budi usai konferensi pers.

Melalui perubahan ini, pemerintah berharap distribusi Minyakita kembali terfokus ke pasar tradisional. Di sisi lain, kebutuhan bantuan pangan tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu pasokan dan stabilitas harga di masyarakat.

Dampak kenaikan harga bahan baku plastik mulai menjalar ke komoditas minyak goreng kemasan premium. Lonjakan biaya kemasan membuat harga di tingkat ritel perlahan terkerek, meski pemerintah memastikan pasokan tetap aman. Berdasarkan penelusuran, harga minyak goreng premium ukuran 2 liter berada di kisaran Rp42.900-Rp47.000. Sementara itu, kemasan 1 liter dijual sekitar Rp21.600-Rp23.100, dan ukuran 1,8 liter sekitar Rp40.500. Produk yang tersedia antara lain Sovia, Sunco, Tropical, Fortune, hingga Filma. Adapun, minyak goreng berbahan kelapa seperti Barco dijual jauh lebih tinggi, mencapai Rp59.900 per liter. (tin,ktn,ist/dya)

HET Dikaji untuk Dinaikkan

tidak ada perubahan harga (saat ini)."

Di lapangan, harga bahkan sudah menyentuh sekitar Rp15.900 per liter akibat stok tersedot program bantuan pangan bagi 33 juta penerima, dengan distribusi jutaan liter selama dua bulan. Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menegaskan, "Kita lihat kan itu sudah lama... sudah 3 tahun lebih ya, 15.700. Kan semua harus disesuaikan," meski mengakui "Belum, nanti kami kaji... kami hitung bareng-bareng."

Pemerintah menyebut faktor evaluasi mencakup harga crude palm oil (CPO), biaya kemasan, dan distribusi, serta membuka peluang penyesuaian dua arah mengikuti pasar. Untuk meredam gejolak pasokan, distribusi akan ditingkatkan dan Perum Bulog kini diizinkan menyalurkan bantuan dengan merek minyak goreng lain agar ketersediaan di pasar tetap terjaga.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah memang akan mengkaji ulang HET Minyakita. "Sudah tiga tahun lebih, Rp15.700 kan semua

harus disesuaikan," ujarnya, menambahkan, "Ya nanti kita kaji. Kita hitung bareng-bareng."

Pemerintah juga memperkuat distribusi melalui BUMN pangan dengan potensi peningkatan porsi distribusi minimal 35 persen serta pelibatan entitas seperti Perum Bulog dan ID FOOD.

Terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat M. Sinaga menilai mahalannya kemasan memang menjadi beban utama dalam distribusi minyak goreng kemasan. Menurut Sahat, sejak lama biaya pengemasan sudah menjadi faktor yang membuat harga minyak goreng lebih tinggi, mulai dari investasi mesin pengemasan hingga distribusi dalam bentuk kemasan kecil.

"Sekarang harga plastik membubung tinggi dan bahkan bukan karena harga, juga kemungkinan produksi barang plastik akan mandek, karena tidak ada sumber bahan baku," kata Sahat. (wid,rls,ant/dya)

PARPOL BEDA PENDAPAT SOAL WAKTU BAHAS RUU PEMILU

Perbedaan pandangan muncul di kalangan partai politik terkait waktu pembahasan RUU Pemilu. Sejumlah partai mendorong agar revisi aturan itu segera dibahas demi mengantisipasi tahapan Pemilu 2029, sementara sebagian lainnya menilai pembahasan belum mendesak dan tidak perlu tergesa-gesa karena waktu masih cukup panjang.

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, mendorong agar revisi Undang-Undang Pemilu segera dibahas pada tahun ini. Ia menyebut berbagai proses



Kendaraan melintas di dekat bendera Partai Politik yang terpasang pada pembatas jalan di Jakarta.(dokant)

pendalaman materi sebenarnya sudah berjalan, baik di internal partai maupun di parlemen.

"Di masing-masing partai melakukan kajian, diskusi, pendalaman dan simulasi soal materi-materi krusial UU Pemilu.

Selain itu, di Komisi II berbagai konsinyering, dengar pendapat, diskusi dengan berbagai stakeholder juga telah dilakukan," kata Cak Udin, Rabu (22/4/2026).

Menurut dia, di Komisi II DPR RI, sejumlah forum pembahasan seperti

Pemerintah Targetkan Rampung 2,5 Tahun

ujar Yusril, Rabu (22/4/2026).

Ia mengingatkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan regulasi pemilu kerap diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah disahkan. Hal ini, menurut dia, kerap memunculkan perubahan yang berdampak luas, baik bagi pemerintah maupun penyelenggara pemilu.

"Mahkamah bikin pembatalan ataupun penafsiran baru lagi, kadang-kadang kaget-kaget dan itu bukan hanya merepotkan pemerintah dari segi anggaran, dari segi pengamanan, tapi juga merepotkan KPU sebagai pelaksana pemilu di lapangan," katanya.

Karena itu, pemerintah berharap pembahasan RUU Pemilu sudah mulai berjalan pada pertengahan tahun ini. Meski begitu, Yusril menegaskan inisiatif pembahasan tetap berada di tangan DPR.

"Kalau DPR sudah selesai menyusun draf akan disampaikan kepada Presiden, dan tentu Presiden akan mengeluarkan surpres untuk menunjuk beberapa menteri untuk membahas RUU tersebut," ujarnya.

Saat ini, kata dia, pemerintah masih menunggu draf dari DPR sebelum menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM). Sejumlah isu krusial, terutama yang berkaitan dengan putusan MK, juga masih menunggu arahan presiden.

"Dan kita menunggu arahan dari Bapak Presiden karena ada beberapa masalah yang sangat apa namanya krusial, sehubungan dengan beberapa putusan dari MK," kata Yusril.

Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan, Dedy Sitorus, menyebut pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu masih berada pada tahap awal. Ia mengaku telah mendengar adanya diskusi di tingkat pimpinan, namun belum ada draf resmi yang disusun.

"Saya dengar sudah ada diskusi-diskusi di tingkat pimpinan yang sifatnya masih bersifat pendahuluan dan informal terkait beberapa isu krusial. Sejauh ini belum ada yang bersifat draf karena masih dimatangkan di Badan Keahlian DPR RI," kata Dedy, Rabu (22/4/2026). (gus,ist/dya)

konsinyering hingga rapat dengar pendapat sudah digelar dengan melibatkan berbagai pihak. Karena itu, ia berharap pembahasan resmi segera masuk tahap formal.

"Harapannya di tahun ini pembahasan resmi RUU Pemilu sudah bisa dilakukan, baik melalui panja maupun mekanisme lainnya," ujarnya.

PKB, kata dia, tengah menyoroti sejumlah isu krusial dalam revisi tersebut, terutama menyangkut sistem pemilu dan metode penghitungan kursi. Dua aspek ini dinilai menentukan kualitas representasi suara pemilih.

"Ya di antaranya itu, tertutup atau terbuka, cara penghitungan kursi dan sebagainya. Intinya kita ingin UU Pemilu yang tidak menghilangkan suara rakyat," kata dia.

Selain itu, PKB menilai revisi regulasi perlu diarahkan untuk memperkuat demokrasi yang sehat sekaligus menekan praktik politik uang. Soal ambang batas parlemen, partai ini tidak menjadikannya sebagai fokus utama.

"Moderat saja, yang penting menjamin suara tidak hilang," ujar Hasanuddin.

Ia juga mengingatkan adanya risiko bila pembahasan dilakukan terlalu dekat dengan tahapan pemilu. Namun, ia meyakini DPR dan pemerintah telah memperhitungkan hal tersebut.

"Jika mengganggu tahapan tentu berisiko, tetapi saya yakin semua pihak sudah menghitungnya," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPR, Puan Maharani, membantah anggapan bahwa pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara tertutup. Ia menegaskan komunikasi politik tetap berjalan terbuka, baik melalui jalur formal maupun informal.

"Kalau terkait dengan RUU Pemilu memang hal itu kan ada batas waktunya dan komunikasi-komunikasi politik tetap kami lakukan di partai politik dan itu tidak dilakukan tertutup," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 21 April 2026.

Menurut dia, dinamika komunikasi politik tidak selalu berlangsung dalam forum resmi. "Namanya komunikasi itu kan bisa dilakukan secara formal dan informal namun komunikasi politik selalu tetap dilakukan," ujarnya.

Berbeda dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dia meminta pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu tidak dilakukan terburu-buru. DPR, kata dia, justru mendorong seluruh partai politik untuk terlebih dahulu melakukan simulasi terhadap berbagai opsi sistem pemilu.

"Kita lagi minta partai-partai politik melakukan simulasi, baik yang ada di parlemen maupun non-parlemen. Jadi jangan diburu-buru untuk pembahasannya," ujar Dasco, Rabu (22/4/2026). (gus,ist,kum/dya)

PERKEMBANGAN AMBANG BATAS PARLEMEN DI INDONESIA DARI MASA KE MASA

Pemilu 2009

- Dasar Hukum: UU No. 10/2008
- Besaran Ambang Batas: 2,5% (Suara Sah Nasional)

Pemilu 2014

- Dasar Hukum: UU No. 8/2012
- Besaran Ambang Batas: 3,5% (Suara Sah Nasional)

Pemilu 2019

- Dasar Hukum: UU No. 7/2017
- Besaran Ambang Batas: 4% (Suara Sah Nasional)

Pemilu 2024

- Dasar Hukum: UU No. 7/2017
- Besaran Ambang Batas: 4% (Suara Sah Nasional)

Pemilu 2029

- Dasar Hukum: Putusan MK
- Besaran Ambang Batas: Akan diubah (Revisi UU)



MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakan, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan revisi Undang-Undang Pemilu dapat rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Target tersebut disiapkan untuk memberi ruang persiapan yang cukup menjelang Pemilu 2029.

"Target kita sebenarnya RUU ini sudah selesai pada saat 2,5 tahun usia dari pemerintahan ini, supaya ada tenggang waktu yang cukup mempersiapkan pemilu 2,5 tahun sebelum dilaksanakan tahun 2029,"

PTUN Tolak Gugatan terhadap Fadli Zon soal Tragedi 1998 KOALISI SIPIL: IMPUNITAS BERBALUT PROSEDUR

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menutup pintu bagi gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (21/4/2026), majelis hakim menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima. Alasannya, perkara tersebut dinilai berada di luar kewenangan absolut PTUN.

Amar putusan mencatat, pengadilan menerima eksepsi tergugat terkait kompetensi absolut. Dengan kata lain, objek gugatan—yakni pernyataan Fadli Zon mengenai dugaan perkosaan massal Mei 1998—tidak dianggap sebagai



ranah sengketa tata usaha negara. Para penggugat pun dihukum membayar biaya perkara Rp233.000.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa objek yang disengketkan bukan termasuk ranah

kewenangan absolut PTUN. “Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa ini,” demikian kutipan dari salinan putusan yang dirilis Rabu

(22/4/2026).

Namun bagi koalisi sipil, putusan ini bukan sekadar kekalahan prosedural. Mereka melihatnya sebagai sinyal mundur negara hukum.

“Majelis hakim justru mencari celah lain melanggengkan impunitas berbalut prosedural,” kata kuasa hukum koalisi, Virdinda Achmad pada Rabu (22/4/2026).

Koalisi menilai hakim menghindari pokok perkara dan menegasikan fakta yang telah dibangun selama persidangan, termasuk 95 bukti serta keterangan para saksi dan ahli. Mereka mencurigai adanya upaya sistematis untuk menjauhkan perkara dari substansi utama: pengungkapan kebenaran tentang perkosaan massal Mei 1998.

“Patut dicurigai bahwa ada upaya untuk mengamankan diri dan menjauhkan dari pembahasan yang lebih substansial,” ujar Virdinda.

PTUN dalam pertimbangannya menyebut objek gugatan tidak bersifat konkret, tidak final, bukan tindakan faktual, serta berada dalam lingkup Undang-Undang Pers. Selain itu, perkara dianggap tidak termasuk administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbarui melalui UU Nomor 51 Tahun 2009.

Argumen ini ditolak oleh tim penggugat. Pengacara publik LBH Jakarta, Daniel Winarta, menyebut hakim menggunakan logika hukum lama dan mengabaikan perkembangan regulasi.

“Hakim tidak menilai pokok perkara, dia berlindung di balik aspek formil. Putusannya keliru, dangkal, dan pertimbangannya buruk,” ujar Daniel.

Koalisi memastikan akan mengajukan banding. Mereka ingin membuktikan bahwa pernyataan resmi Menteri Kebudayaan—yang disampaikan melalui siaran pers—merupakan tindakan administratif yang seharusnya dapat diuji di PTUN.

Kritik juga datang dari Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998, Marzuki Darusman, yang turut menjadi penggugat. Ia menilai putusan ini berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap hukum.

“PTUN merupakan pintu pulihnya kepercayaan publik. Ketika gugatan ditolak, ini justru menjadi pintu runtuhnya kepercayaan itu,” kata Marzuki. (wid,ist,bbc/dya)

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

1. Objek gugatan tidak bersifat konkret.
2. Objek gugatan tidak bersifat final dalam arti luas.
3. Objek gugatan bukan merupakan tindakan faktual.
4. Objek gugatan tidak dapat dikenai akibat pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Objek gugatan merupakan lingkup dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
6. Objek gugatan tidak termasuk dalam lingkup administrasi pemerintahan

Dari Ruang Sidang ke Luka Lama: Ingatan Mei 1998

informasi yang diduga menyesatkan di tengah proses hukum yang belum tuntas.

Gugatan didaftarkan pada 2 Oktober 2025. Selama enam bulan persidangan, penggugat menghadirkan 95 bukti, lima bukti elektronik, serta sejumlah saksi dan ahli. Di antaranya Sri Palupi (tim asistensi TGPF), Riawan Tjandra (ahli hukum administrasi), Livia Iskandar (psikolog), Herlambang Wiratraman (ahli hukum tata negara), dan Andi Achdian (sejarawan).

Mereka juga menghadirkan Maria Ulfa Anshor dari Komnas Perempuan, serta Wiwin Suryadinata—ibu dari Ita Martadinata, korban yang dibunuh menjelang kesaksiannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Membunuh, membunuh, membunuh! Itu mereka punya keluarga. Gimana jadi ibunya yang mengandung seperti saya?” ucapnya.

Namun seluruh rangkaian itu, menurut koalisi, tak mendapat tempat dalam pertimbangan hakim.

Di luar ruang sidang, luka lama kembali terbuka. Fatia Nadia,

pendamping korban, menyampaikan kisah-kisah yang selama ini tercatat dalam dokumen resmi negara.

Ia mengenang Fransiska, korban berusia 11 tahun yang meninggal setelah diperkosa. Ia juga menceritakan Ita Martadinata, yang dibunuh sepekan sebelum bersaksi di PBB.

“45 menit setelah dibunuh, saya hadir di kamarnya, darahnya masih hangat,” kata Fatia. Ada pula korban berusia 13 tahun yang dipaksa keluarganya sendiri untuk bunuh diri karena stigma. Fatia menegaskan, fakta-fakta tersebut telah diakui negara dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Fatia menegaskan, fakta-fakta tersebut telah diakui negara dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Namun penolakan gugatan ini, menurutnya, mengirim pesan berbahaya.

“Jika kita membiarkan impunitas para pejabat negara, seluruh tubuh dan seksualitas perempuan Indonesia akan menjadi objek kekerasan berikutnya,” ujarnya. (wud,bbc,ist/dya)

PULUHAN CALON HAJI GAGAL BERANGKAT, TERMASUK IBU HAMIL 10 MINGGU

Puluhan calon jemaah haji dilaporkan gagal berangkat pada musim haji 2026 akibat berbagai faktor, mulai dari masalah kesehatan hingga administrasi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pembatalan keberangkatan seorang calon jemaah perempuan di Makassar karena diketahui sedang hamil 10 minggu.

Seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dipastikan batal berangkat bersama kloter pertama Embarkasi Makassar setelah hasil



Sambutan bagi jemaah haji Indonesia yang mendarat di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi, Rabu (23/4/2026).ist

pemeriksaan kesehatan menunjukkan yang bersangkutan tengah hamil 10 minggu. Keputusan itu diambil menjelang keberangkatan, kurang dari 24 jam sebelum jadwal terbang.

Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, menjelaskan ketentuan medis yang berlaku cukup ketat. "Jadi di dalam pemeriksaan kesehatan embarkasi,

jemaah yang boleh diberangkatkan adalah yang kehamilannya berusia 16 minggu sampai 24 minggu. Di bawah 16 minggu tidak layak terbang, di atas 26 minggu juga tidak layak. Usia 10 minggu jelas tidak memenuhi syarat," ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Aturan tersebut merujuk pada standar keselamatan penerbangan sekaligus pertimbangan kesehatan ibu

dan janin. Kehamilan di luar rentang yang ditentukan dinilai berisiko tinggi, baik karena potensi keguguran maupun kemungkinan persalinan dini selama perjalanan jauh dan rangkaian ibadah haji yang menuntut kondisi fisik prima.

Pembatalan yang terjadi mendekati waktu keberangkatan membuat panitia tidak sempat mengajukan pengganti. Prosedur penggantian jemaah membutuhkan waktu sekitar dua hari sejak usulan diajukan ke pusat. "Kami sudah melaporkan ke pusat. Karena waktunya tidak sampai 24 jam, kemungkinan kursi ini kosong. Jadi jumlah jemaah yang berangkat nanti menjadi 392 (386 calon haji ditambah 7 petugas haji), dari kuota normal 393 orang," kata Iqbal.

Kloter pertama Embarkasi Makassar dijadwalkan berangkat pada Rabu, 22 April 2026, pukul 03.20 dini hari. Dengan adanya pembatalan tersebut, satu kursi dipastikan tidak terisi.

Panitia memastikan jemaah lain dari Kabupaten Soppeng dalam kondisi sehat dan tetap diberangkatkan sesuai jadwal. Sementara itu, calon jemaah yang batal berangkat akan diprioritaskan untuk keberangkatan pada musim haji tahun berikutnya, mengingat masa tunggu dan biaya yang telah disetorkan.

Sebelumnya, seluruh calon jemaah perempuan dalam kategori usia subur diwajibkan menjalani pemeriksaan urine sebagai bagian dari skrining kesehatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan kehamilan sebelum jemaah dinyatakan layak terbang menuju Tanah Suci.

Tujuh calon jemaah haji asal Provinsi Bengkulu dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Pembatalan terjadi karena sejumlah jemaah mengalami gangguan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk diberangkatkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan seluruh posisi yang kosong telah digantikan oleh jemaah cadangan. "Kita kemarin ada tujuh orang, dari awal itu ada yang meninggal, ada yang sakit juga. Alhamdulillah sekarang sudah kita ganti semua," ujarnya. (wid,ist,kum/dya)

HAJI 2026 UNTUK IBU HAMIL & LANSIA

IBU HAMIL

- **Usia kandungan:** 14–26 minggu saat keberangkatan.
- **Wajib vaksin:** Meningitis meningokokus
- **Kondisi kesehatan:**
 - Tidak berisiko tinggi
 - Tidak ada penyakit penyerta
- **Pertimbangan utama:**
 - Cegah keguguran & komplikasi
 - Pastikan aman untuk perjalanan jauh & ibadah fisik

LANSIA

- **Prioritas usia:** ≥ 70 tahun (2026)
- **Syarat masa tunggu:**
 - Haji reguler: ≥ 5 tahun
 - Haji khusus: ≥ 2 tahun
- **Pendamping:**
 - Dianjurkan / wajib (≥ 65 tahun)
 - Keluarga inti (anak/suami/istri/saudara)
- **Syarat kesehatan (istitha'ah):**
 - Mampu secara fisik & mental
 - Tidak demensia berat / gagal organ



PENYELENGGARAAN ibadah haji 2026 menghadirkan pembaruan dalam pelayanan jemaah, khususnya pada tahap penerimaan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Sukolilo. Kini, proses tersebut menerapkan sistem one stop service (OSS) yang dirancang untuk menyederhanakan alur administrasi sekaligus mempermudah keberangkatan jemaah.

Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Haji Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Ahmad Mudhofar, menjelaskan bahwa sistem ini menggabungkan seluruh tahapan layanan dalam satu alur terpadu yang

Sistem One Stop Service Mudahkan Jemaah

lebih efisien. Dengan skema ini, jemaah tidak perlu lagi berpindah-pindah lokasi untuk mengurus berbagai keperluan seperti sebelumnya. Seluruh proses dilakukan dalam satu rangkaian di aula penerimaan, sehingga jemaah merasa lebih praktis dan tidak mudah kelelahan.

Dalam pelaksanaannya, layanan OSS mencakup beberapa tahapan utama. Di antaranya adalah pemeriksaan kesehatan akhir guna memastikan kelayakan terbang, verifikasi dokumen seperti paspor dan visa, pembagian gelang identitas serta kartu Nusuk, hingga penyerahan uang saku (living cost) sebesar 750 riyal Arab Saudi.

Berbeda dari tahun sebelumnya, kartu Nusuk kini sudah diterima jemaah sejak berada di embarkasi, sehingga tidak perlu menunggu hingga tiba di Tanah Suci. Pengaturan jemaah juga dilakukan berdasarkan nomor kelompok terbang (kloter). Jemaah dalam kloter ganjil akan ditempatkan di Mina, sedangkan kloter genap ditempatkan di Muzdalifah.

Setelah seluruh tahapan selesai, jemaah langsung diarahkan menuju kamar asrama untuk beristirahat sebelum jadwal keberangkatan. Dalam praktiknya, jemaah dengan kategori risiko tinggi diprioritaskan untuk menjalani proses lebih awal.

Namun demikian, Ahmad Mudhofar mengingatkan pentingnya kedisiplinan jemaah, terutama terkait barang bawaan. Ia menegaskan, "Paspor harus dibawa oleh jemaah karena akan digunakan untuk pemeriksaan di Tanah Suci," katanya.

Sementara itu, sebanyak 380 jemaah calon haji dari kloter 1 Embarkasi Surabaya asal Probolinggo dijadwalkan berangkat dari Bandara Internasional Juanda pada Rabu (22/4/2026) pukul 09.30 WIB. Selanjutnya, 380 jemaah dari kloter 2 diberangkatkan pada hari yang sama pukul 13.55 WIB. Pada hari yang sama, Asrama Haji Embarkasi Surabaya juga menerima kedatangan jemaah dari kloter 3, 4, 5, 6, dan 7. (wid,rls,dya)

DANA ANJLOK, KUOTA SERAGAM GRATIS KOTA MALANG HANYA 1.000 SISWA

MALANG - Kuota penerima program seragam gratis tahun 2026 di Kota Malang anjlok. Kondisi ini dampak dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Diperkirakan, jumlah penerima bantuan hanya sekitar 1.000 siswa. Jauh lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 13 ribu siswa, gabungan jenjang SD dan SMP.

"Yang jelas di tahun ini, yang sudah ada di anggaran kami baru seragam gratis untuk anak-anak pra sejahtera," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, Rabu (22/4/2026).

Diketahui, TKD dari pusat ke Kota Malang pada tahun anggaran (TA) 2026 menurun sekitar Rp284 miliar atau 21,22 persen. Di tahun ini, Pemkot Malang hanya menerima sekitar Rp1,057 triliun, turun dari anggaran tahun lalu yang mencapai Rp1,342 triliun.

Suwarjana mengakui, keterbatasan anggaran membuat pemerintah kota harus melakukan penyesuaian prioritas program.

Dampaknya, program seragam gratis yang sebelumnya bersifat lebih luas kini dipersempit hanya untuk kelompok prasejahtera.

Berbeda dengan tahun ajaran 2025/2026 yang menjangkau seluruh siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP negeri, pada tahun ini penentuan penerima akan melalui mekanisme seleksi berbasis kondisi ekonomi siswa.

Menurut Suwarjana, pihak sekolah akan menjadi mengusulkan nama-nama siswa penerima bantuan. Hal ini karena sekolah dinilai paling memahami kondisi sosial ekonomi peserta didiknya.

"Ada syarat-syaratnya, kemudian yang mengajukan adalah sekolah. Karena yang tahu apakah anak tersebut pra sejahtera atau tidak, adalah pihak sekolah," jelasnya.

Penurunan cakupan program ini juga terlihat dari sisi anggaran yang disediakan. Jika pada tahun sebelumnya anggaran program seragam gratis mencapai Rp6 miliar, pada tahun ini hanya dialokasikan sekitar Rp2 miliar.

"Dari nominalnya itu saja sudah

kelihatan," tambah Suwarjana.

Selain itu, wacana perluasan program yang menasar siswa baru di sekolah swasta juga dipastikan belum dapat direalisasikan pada tahun ini. Lagi-lagi, faktor efisiensi anggaran menjadi alasan utama. "Belum bisa terealisasi. Karena efisiensi itu tadi," tegasnya.

Namun, pemerintah tetap berupaya menjaga kualitas bantuan yang diberikan. Pada tahun ini, Disdikbud Kota Malang menargetkan bantuan diberikan dalam bentuk seragam jadi, bukan lagi kain seperti tahun sebelumnya.

Untuk siswa SD, bantuan berupa satu stel seragam merah putih dan satu stel seragam pramuka. Sementara untuk siswa SMP, bantuan berupa



Arsip-Pemkot Malang membagikan paket seragam gratis untuk para murid baru jenjang SD-SMP tahun ajaran 2025/2026. (Santi/Lentera)

seragam putih biru dan pramuka. Seluruh paket juga diupayakan dilengkapi dengan atribut seperti dasi dan topi.

"Kami usahakan seragam jadi karena untuk pra sejahtera. Lengkap dengan dasi insyaallah," kata Suwarjana. (Santi/Dya)

PEMKAB MALANG BENARKAN

BELANJA PEGAWAI DI ATAS AMBANG BATAS 30%



Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah. (Santi/Lentera)

melebihi sedikit, di 36 persen," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, Rabu (22/4/2026).

Diketahui, ketentuan batas maksimal belanja pegawai tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dalam regulasi itu, pemerintah daerah diwajibkan menekan belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari total APBD, diterapkan paling lambat tahun 2027.

Melansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki struktur anggaran

daerah. Agar alokasi APBD tidak terlalu terserap pada belanja pegawai, melainkan dapat dialihkan untuk sektor pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Namun demikian, Nurman menegaskan kondisi riil di Kabupaten Malang tidak bisa disederhanakan hanya berdasarkan angka persentase semata. Ia menyebut, kebutuhan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, menjadi salah satu faktor utama tingginya belanja pegawai.

Menurutnya, banyak sekolah di Kabupaten Malang yang masih kekurangan tenaga guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahkan, dalam sejumlah kasus, hanya kepala sekolah yang berstatus ASN, sementara tenaga pengajar lainnya masih didominasi oleh tenaga non ASN atau kontrak. "Fakta di lapangan seperti ini kan tidak bisa kita abaikan," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Nurman, Pemkab Malang melalui Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Untuk menyampaikan kondisi faktual yang dihadapi daerah terkait struktur belanja pegawai.

Nurman menambahkan, pendekatan yang dilakukan bukan sekadar meminta kelonggaran, melainkan memberikan pemahaman menyeluruh kepada pemerintah pusat mengenai kebutuhan riil daerah.

"Yang kami lakukan adalah mengkomunikasikan fakta-fakta yang ada. Bahwa kondisi kami memang seperti ini dan kebutuhan tersebut tidak bisa ditutup mata," tegasnya.

Disinggung terkait kemungkinan pengajuan diskresi kepada pemerintah pusat, Nurman mengaku belum dapat memastikan hal tersebut. Dikatakannya, keputusan terkait diskresi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat setelah mempertimbangkan berbagai aspek. (Santi/Dya)

TRUMP KLAIM SITA KAPAL BERISI 'KADO' SENJATA CHINA UNTUK IRAN



Presiden Donald Trump melontarkan pernyataan yang memantik polemik baru di tengah konflik Timur Tengah. Ia mengklaim Amerika Serikat mencegat sebuah kapal yang diduga membawa “hadiah” dari China untuk Iran. Tuduhan inipun langsung dibantah Beijing.

Trupp menyebut aparat AS menangkap kapal yang mengangkut barang mencurigakan. Ia tidak menjelaskan rinci isi muatan tersebut, namun memberi isyarat bahwa barang itu berkaitan dengan bantuan militer.

“Kami menangkap sebuah kapal

kemarin yang membawa beberapa barang, yang sebenarnya tidak terlalu menyenangkan, sebuah 'kado' dari China, mungkin, saya tidak tahu,” kata Trump. “Saya pikir saya punya kesepahaman dengan Presiden Xi, tapi ya sudahlah. Begitulah dinamika perang, bukan?” ujarnya dalam

wawancara dengan CNBC, dikutip Rabu (22/4/2026),

Pernyataan itu muncul saat Washington tengah berupaya mengisi ulang stok amunisi di tengah eskalasi konflik dengan Teheran. Meski tidak eksplisit, ucapan Trump dibaca sebagai sinyal bahwa kapal tersebut

membawa perlengkapan militer mematikan.

Hingga kini, Gedung Putih belum memberi penjelasan resmi. Namun dari Beijing, bantahan disampaikan terbuka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan tidak ada keterlibatan negaranya.

“Sejauh yang saya tahu, kapal yang disita AS adalah kapal kontainer asing. China menolak segala bentuk asosiasi palsu dan spekulasi ini,” ujarnya.

Kedutaan Besar China di Washington juga menekankan bahwa Beijing menangani ekspor militer secara “hati-hati dan bertanggung jawab”, termasuk pengawasan ketat terhadap barang-barang berteknologi ganda (dual-use).

Tuduhan Washington terhadap Beijing datang di tengah ketidakjelasan peran China dalam konflik Iran. Sebelumnya, pejabat AS lebih dulu menuding Rusia aktif membantu Teheran, sementara keterlibatan China dinilai masih abu-abu. Di satu sisi, Beijing dikenal menghindari pengiriman senjata ke wilayah konflik demi menghindari sanksi ekonomi. Di sisi lain, laporan intelijen AS yang dikutip CNN menyebut China tengah menyiapkan pengiriman sistem pertahanan udara, termasuk rudal antipesawat panggul.

Kontradiksi ini diperkuat oleh pernyataan Trump sendiri sebelumnya. Dalam wawancara dengan Fox Business, ia mengaku telah menerima jaminan pribadi dari Presiden China, Xi Jinping, melalui surat bahwa Beijing tidak memasok senjata ke Iran.

Ketegangan ini berpotensi mengganggu rencana pertemuan Trump dan Xi di Beijing pada pertengahan Mei—agenda yang sempat tertunda akibat perang Iran.

Di tengah situasi tersebut, analisis menilai Washington tidak berada pada posisi kuat untuk memperbesar konflik dengan China. “Faktanya, posisi Presiden Trump melemah karena keterlibatan dalam perang di Iran. Ia tidak mampu menghadapi perang dagang baru yang mahal dengan China dan kemungkinan tidak ingin mengganggu kunjungan mendatang ke Beijing,” kata Jennifer Kavanagh. “Karena AS kemungkinan tidak akan merespons, risiko bagi China relatif rendah.” (tin,cnbc,rtr;ist/dya)

Lobi Pembebasan Kapal Pertamina di Selat Hormuz Diakui Alot

UPAYA pemerintah membebaskan dua kapal tanker milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz belum menemui jalan terang. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut proses negosiasi berjalan alot, tersandera dinamika konflik dan kebijakan di lapangan.

Berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026), Sugiono mengatakan komunikasi terus dilakukan, baik melalui Kedutaan Besar RI di Teheran maupun tim dari Pertamina. Fokus pembicaraan, kata dia, adalah membuka akses agar kapal-kapal tersebut bisa keluar dari jalur yang kini terkunci.

“Mengenai negosiasi kapal Pertamina di Selat Hormuz, tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini kedutaan besar kita di Teheran, juga terus melakukan pembicaraan. Kemudian bersama juga dengan tim dari Pertamina, terkait dengan izin lewat dari kapal-kapal kita yang ada di Selat Hormuz,” ujar Sugiono.

Namun, situasi di lapangan tidak sederhana. Ia mengakui kondisi internal Iran yang masih berkonflik

dengan Amerika Serikat dan Israel ikut memperumit proses diplomasi.

“Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri,” katanya.

Menurut Sugiono, kendala lain muncul dari jurang antara kebijakan di tingkat pusat dan implementasi di lapangan. Keputusan otoritas Iran, kata dia, tidak selalu berjalan mulus ketika diterapkan.

“Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa,” ujarnya.

Tekanan makin besar setelah Amerika Serikat memberlakukan blokade militer di jalur pelayaran tersebut. Kebijakan ini membuat setiap kapal yang melintas harus memenuhi sejumlah persyaratan tambahan dari Washington—yang hingga kini masih dinegosiasikan.

“Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait

dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan,” kata Sugiono.

Dua kapal yang dimaksud—Pertamina Pride dan Gamsunoro—telah terjebak sejak awal pecahnya perang di kawasan. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui lebih dari 20 persen perdagangan minyak mentah dan gas alam cair dunia, sehingga setiap gangguan di wilayah ini langsung berdampak pada rantai pasok energi global.

Meski demikian, Sugiono memastikan kondisi pasokan energi nasional masih aman. Ia menekankan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari kawasan Timur Tengah tidak dominan, karena sumber impor tersebar dari berbagai negara. (tin,ist,rtr/dya)



kapal-kapal dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sedang beroperasi di Selat Hormuz. (dok.ist)

TANAMAN OKRA BANTU JAGA KESEHATAN JANTUNG

Okra atau yang memiliki nama latin *Abelmoschus esculentus* adalah tanaman berbentuk polong panjang berwarna hijau dengan tekstur agak berbulu di permukaannya. Sayuran ini dikenal dengan sebutan lady's finger di beberapa negara karena bentuknya yang ramping.

Okra banyak dibudidayakan di wilayah beriklim hangat seperti Asia, Afrika, dan Amerika. Sayuran ini menghasilkan lendir alami (mucilage) dengan tekstur kental saat diolah, sehingga kerap dimanfaatkan sebagai bahan pengental dalam sup maupun hidangan kuah.

Meskipun teksturnya berlendir dan belum begitu populer, okra sebenarnya mengandung beragam nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berbagai khasiat yang dimilikinya, sayuran ini tentu sayang untuk dilewatkan dari menu harian.

Okra sebenarnya tergolong dalam jenis buah-buahan, tetapi sering kali dianggap sebagai sayuran. Hal ini terjadi karena okra cukup sering diolah menjadi berbagai hidangan, seperti lalapan, tumis, hingga gorengan.

Okra juga kaya akan kalsium, kolin, zinc, selenium, vitamin B kompleks, vitamin E, serta berbagai jenis antioksidan, termasuk polifenol, flavonoid, isoquercetin, lutein, dan zeaxanthin.

Okra termasuk makanan yang terjangkau yang kaya gizi serta bermanfaat bagi kesehatan. Berikut beberapa manfaat okra bagi kesehatan tubuh.

Mengontrol kadar gula darah

Salah satu khasiat okra yang paling dikenal adalah kemampuannya membantu menurunkan seklaigus mengendalikan kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi okra secara rutin dapat menghambat penyerapan gula di usus serta meningkatkan respons tubuh terhadap hormone insulin.

Okra termasuk bahan pangan yang memiliki glikemik rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat. Bagi orang sehat, mengonsumsi okra juga bermanfaat untuk menurunkan risiko terkena diabetes.

Menyehatkan saluran pencernaan

Kandungan serat dan air yang melimpah di dalam okra dapat membantu merangsang pergerakan usus agar proses pencernaan berjalan lebih lancar.

Serat tersebut juga berperan dalam membuat tinja menjadi lebih lembut, sehingga lebih mudah dikeluarkan dan dapat membantu mencegah sembelit.

Konsumsi okra secara rutin juga dapat mendukung kesehatan saluran pencernaan secara keseluruhan. Selain itu, okra juga memiliki efek prebiotik yang bermanfaat dalam menjaga keseimbangan bakteri baik (probiotik) di usus.

Bakteri baik ini sangat penting untuk membantu proses penyerapan nutrisi, meningkatkan daya tahan

tubuh, serta menjaga kesehatan sistem pencernaan agar tetap optimal. Dengan kondisi usus yang sehat, tubuh pun dapat berfungsi dengan lebih baik setiap hari.

Menjaga kesehatan jantung

Konsumsi okra dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai gangguan kardiovaskular, karena nutrisi melimpah di dalam okra bermanfaat untuk menekan peradangan, mencegah pembekuan darah, membantu mengatur tekanan darah.

Meningkatkan kekuatan tulang dan sendi

Manfaat penting lainnya dari okra adalah membantu menjaga kekuatan tulang dan sendi. Hal ini berkaitan dengan kandungan mineral utamanya, yaitu kalsium, yang berperan besar sebagai sumber utama dalam menjaga kepadatan dan kesehatan tulang.

Selain itu, kalsium juga membantu mendukung fungsi sendi agar tetap kuat dan tidak mudah mengalami gangguan seiring bertambahnya usia. Jika tubuh kekurangan kalsium, tulang akan lebih rentan mengalami keropos dan kehilangan kekuatannya secara perlahan.

Kondisi ini terjadi karena tubuh akan mengambil cadangan kalsium dari tulang ketika asupan harian tidak mencukupi, sehingga membuat tulang

semakin lemah. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan gangguan pada sendi yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari.

Mengurangi risiko terjangkit kanker

Ekstrak okra diketahui mengandung berbagai senyawa yang memiliki sifat antioksidan dan sifat antikanker.

Kandungan ini berperan penting dalam membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit.

Selain itu, senyawa tersebut juga dipercaya mampu membantu menghambat perkembangan sel kanker, sehingga okra sering dianggap sebagai salah satu sayuran yang baik untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. (Nabilla – mahasiswa UINSA, Berkontribusi dalam tulisan ini)

Kandungan yang terdapat dalam 100 gram okra mentah

Kalori: 33 gram

Karbohidrat: 7 gram

Protein: 2 gram

Serat: 3 gram

Magnesium: 55 – 60 miligram (14 % kebutuhan harian)

Folat: 60 miakrogram

Vitamin A: 700 IU

Vitamin C: 23 miligram

Vitamin K: 30 mikrogram



Ikan Sapu-Sapu Disebut Hama, Kenapa?



Fluorescence (XRF) menunjukkan keberadaan arsen (As), kadmium (Cd), merkuri (Hg), dan timbal (Pb) dalam konsentrasi yang melampaui ambang batas maksimum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Dewi Elfidasari dkk. (2023) yang dipublikasikan melalui National Library of Medicine. Studi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara paparan logam berat dengan sistem biologis ikan, termasuk adaptasi mikrobiota usus yang memungkinkan ikan bertahan di lingkungan tercemar.

Variasi kandungan logam berat juga dipengaruhi oleh lokasi geografis. Studi di wilayah hulu (Bogor-Depok-Jakarta) sempat menunjukkan kadar yang lebih rendah, tetapi penelitian di wilayah hilir Jakarta dengan tingkat pencemaran lebih tinggi secara konsisten menemukan kadar logam berat yang lebih besar, terutama timbal, kadmium, merkuri, dan arsen.

Fenomena meningkatnya perhatian publik terhadap ikan sapu-sapu tidak dapat dilepaskan dari viralitas di media sosial hingga respons kebijakan pemerintah daerah.

Di Sungai Ciliwung dan sejumlah perairan lain di Jakarta, spesies ini bahkan menjadi target operasi pembasmian massal. Ikan sapu-sapu, yang secara ilmiah dikenal sebagai *Pterygoplichthys pardalis* dan *Pterygoplichthys disjunctivus*, merupakan ikan introduksi dari Sungai Amazon yang masuk ke Indonesia melalui perdagangan ikan hias sebelum menyebar luas ke perairan umum.

Dalam konteks ekologi dan kesehatan lingkungan, keberadaan

ikan ini tidak hanya merepresentasikan invasi biologis, tetapi juga menjadi indikator kuat degradasi kualitas perairan. Berbagai studi ilmiah menunjukkan bahwa ikan sapu-sapu liar, terutama yang hidup di wilayah tercemar, tidak layak untuk dikonsumsi.

Adaptasi Ekologis dan Paparan Polutan

Sebagai organisme bentuk atau bottom feeder, ikan sapu-sapu mengonsumsi detritus, alga, serta sedimen di dasar sungai—kompartemen yang umumnya menjadi tempat akumulasi limbah industri dan domestik. Kemampuan fisiologisnya untuk bertahan pada kondisi kadar oksigen rendah (hipoksia) membuatnya mampu hidup di perairan yang telah mengalami

penurunan kualitas lingkungan, termasuk sungai-sungai di kawasan urban.

Namun, adaptasi ini membawa konsekuensi biologis. Sedimen yang dikonsumsi mengandung berbagai zat berbahaya, sehingga tubuh ikan sapu-sapu menyerap dan menyimpan polutan tersebut dalam jaringan tubuhnya.

Kandungan Logam Berat dan Bukti Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi Nurul Ismi dkk. dalam Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi (2019) mengidentifikasi kandungan logam berat dalam ikan sapu-sapu dari kawasan MT. Haryono, Ciliwung. Analisis menggunakan metode X-Ray

Bioakumulasi dan Ketahanan terhadap Proses Memasak

Secara kimia, logam berat bersifat non-biodegradable dan memiliki karakter bioakumulatif. Artinya, zat tersebut tidak dapat diuraikan melalui proses biologis maupun dihancurkan oleh panas. Oleh karena itu, pengolahan makanan seperti menggoreng atau merebus tidak menghilangkan kandungan logam berat dalam ikan sapu-sapu.

Konsumsi jangka panjang ikan yang terkontaminasi logam berat berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serius, antara lain gangguan sistem saraf, kerusakan ginjal, serta peningkatan risiko kanker. Kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap paparan ini. (ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Revolusi Estetika Kulit Sawo Matang

Pemilihan warna pakaian yang tepat kini menjadi faktor penentu utama dalam membangun kepercayaan diri. Khususnya bagi pemilik kulit sawo matang yang dominan di Indonesia.

Para Perancang Busana nasional merilis daftar palet warna terbaru yang secara klinis dan estetis mampu memberikan efek wajah lebih cerah serta memancarkan kilau alami kulit eksotis.

Hal ini menjadi sangat krusial karena kesalahan pemilihan warna seringkali membuat kulit terlihat lebih gelap atau tidak segar, sementara kombinasi yang tepat justru dapat memancarkan kilau alami kulit eksotis.

Inti dari pemilihan warna ini terletak pada pemahaman undertone kulit yang cenderung hangat (warm). Warna-warna yang memiliki dasar kuning atau keemasan akan menyatu dengan pigmen alami kulit sawo matang, menciptakan harmoni visual yang menenangkan.

Sebaliknya, warna yang terlalu pucat atau dingin (cool undertone) tanpa kontras yang kuat dapat membuat kulit terlihat pucat.

Perancang Busana tahun 2026 mengklasifikasikan warna-warna ini ke dalam kategori yang lebih fungsional, yakni warna kontras tinggi untuk acara formal dan warna netral bumi untuk keseharian. Penggunaan

warna seperti Emerald Green, Terracotta, dan Mustard tetap menjadi primadona karena kemampuannya memberikan dimensi pada tekstur kulit.

Tren tahun 2026 memperkenalkan konsep Meta-Pastel. Berbeda dengan pastel tradisional yang cenderung memudarkan kulit sawo matang, Meta-Pastel memiliki saturasi yang lebih dalam seperti Dusty Lavender dan Sage Green yang telah dimodifikasi.

Warna-warna ini memberikan kesan lembut namun tetap tajam, sangat cocok untuk tampilan profesional yang modern.

Selain itu, penggunaan pewarna alami dari tanaman (organik) memberikan pantulan cahaya yang lebih natural pada kulit dibandingkan pewarna sintesis, sejalan dengan gerakan sustainable fashion yang mendunia tahun ini.

Padu Padan

Gunanya memaksimalkan penampilan, berikut adalah langkah taktis yang direkomendasikan:

Utamakan Warna "Jewel Tones"

Pilih warna permata seperti Ruby Red, Sapphire Blue, dan Emerald Green. Warna-warna ini memiliki intensitas tinggi yang secara otomatis menetralkan rona kusam pada wajah.

Aktivasi Kontras Putih Tulang

Hindari penggunaan putih salju yang terlalu kontras atau putih bersih karena warna ini sering kali terlihat terlalu tajam dan dapat membuat penampilan tampak kurang menyatu dengan warna kulit.

Kontras yang berlebihan juga bisa membuat wajah terlihat lebih pucat atau kurang segar, terutama jika dipadukan tanpa warna pendukung yang tepat. Sebagai gantinya, beralihlah ke warna Off-White atau putih gading yang memiliki nuansa lebih lembut dan hangat.

Warna ini tetap memberikan kesan bersih, elegan, dan mewah, namun terlihat lebih harmonis sehingga tidak tampak "terpisah" dari warna kulit. Hasilnya, penampilan akan terlihat lebih natural, seimbang, dan tetap stylish.

Waspada Warna Neon

Hindari penggunaan warna neon yang terlalu mencolok di dekat area wajah karena warna yang sangat terang dapat memantulkan cahaya berlebih dan membuat kulit terlihat kusam atau bahkan tampak lebam.

Efek pantulan ini sering kali membuat penampilan wajah terlihat kurang segar dan tidak seimbang dengan keseluruhan outfit. Jika tetap ingin menggunakan warna neon, sebaiknya pilih sebagai aksen atau pelengkap saja, bukan sebagai warna

utama pakaian.

Misalnya, gunakan pada aksesoris kecil seperti tas, sepatu, ikat pinggang, atau perhiasan tertentu agar tetap terlihat stylish tanpa memberi efek berlebihan pada tampilan wajah.

Eksperimen Monokromatik

Gunakan gradasi warna yang sama, misalnya coklat tua dipadukan dengan krem, untuk menciptakan tampilan yang lebih harmonis dan elegan. Perpaduan warna senada ini dapat membantu membentuk siluet tubuh yang terlihat lebih tinggi dan proporsional.

Selain itu, warna-warna hangat yang serasi juga mampu memberikan kesan kulit yang lebih sehat, cerah, dan terawat, sehingga penampilan secara keseluruhan terlihat lebih rapi dan menarik. (Nathasya_mahasiswa UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)

Daftar Warna yang Sebaiknya Dihindari

Warna Pastel yang Terlalu Pucat

Warna seperti baby pink, baby blue, atau lavender yang sangat muda sering kali tidak memberikan kontras yang cukup, sehingga membuat kulit terlihat lebih gelap dan pucat.

Warna Abu-Abu Muda

Warna ini cenderung memberikan kesan "dingin" yang bertabrakan dengan undertone hangat kulit sawo matang, sehingga wajah bisa terlihat kurang segar atau lemas.

Kuning Pucat dan Mustard

Kuning yang terlalu mendekati tone kulit bisa membuat penampilan terlihat monoton dan membuat kulit tampak kekuningan yang tidak sehat.

Tiba-tiba Selat Malaka ,...dari hal 1

Laporan soal kapal perang Amerika Serikat yang sempat 'parkir' di jalur itu dijawab santai oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. "Saya kira mereka biasa ya, patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol, kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru," kata Sugiono di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Penjelasan itu menegaskan bahwa lalu lintas militer asing di selat tersebut bukan hal aneh, melainkan bagian dari praktik internasional di jalur pelayaran strategis.

Di level teknis, TNI AL mengingatkan ada aturan yang membatasi sekaligus melindungi lintasan itu. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Tunggul, menyebut kapal asing, termasuk kapal perang, memiliki hak lintas transit di Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. "Hak kapal termasuk kapal perang yang melintas di perairan tersebut merupakan hak lintas transit," ujarnya.

Ia menegaskan pelayaran itu harus berlangsung "terus menerus, langsung dan secepat mungkin" dari satu laut lepas atau ZEE ke bagian lain, merujuk Pasal 37, 38, dan 39 UNCLOS 1982. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi itu lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sehingga seluruh kapal tetap wajib menghormati kedaulatan negarapantai.

Di tengah kerangka hukum itu, wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengenakan pungutan di Selat Malaka menambah dimensi baru--mengaitkan jalur strategis ini bukan hanya dengan keamanan, tetapi juga potensi ekonomi dan tarik-menarik kepentingan global.

Purbaya menilai Indonesia terlalu lama membiarkan potensi ekonomi di jalur strategis itu lewat begitu saja. "Seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggir, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge, nggak tahu betul apa salah?" kata Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu, (22/4/2026).

Ia menyebut peluang pungutan terbuka, sejalan dengan dorongan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia lebih agresif memanfaatkan posisi geografisnya dalam peta ekonomi global.

Purbaya mengaitkan gagasan itu dengan praktik di Selat Hormuz, yang kini mulai dikenai pembatasan dan biaya oleh Iran.

"Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," ujarnya.

Namun ia mengakui skema tersebut tidak sederhana. Pembagian peran dengan Malaysia dan Singapura serta koordinasi regional menjadi prasyarat utama. "Singapura kecil, Malaysia sama, kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif, tetapi tetap terukur," kata Purbaya.

Seperti diketahui, Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz dengan hanya akan mengizinkan sekitar 12 kapal melintas setiap hari. Selain itu, Iran menerapkan biaya mencapai hingga 2 juta dolar AS atau sekitar Rp34,2 miliar untuk satu

kapal tanker berukuran besar.

Perbedaan sikap soal wacana pungutan kapal di Selat Malaka mulai terbuka di ruang publik. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menegaskan jalur itu harus tetap bebas dilalui tanpa biaya. "Hak lintas bebas dijamin bagi semua orang. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, menghalangi, atau mengenakan tol di wilayah sekitar kami," katanya dalam wawancara di Singapura, Rabu (22/4/2026).

Ia menekankan, negara-negara di kawasan bergantung pada perdagangan terbuka. "Kita semua tahu bahwa menjaga jalur pelayaran tetap terbuka adalah demi kepentingan kita," ujarnya, seraya menyebut ketelarasan strategis Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam menjaga kebebasan navigasi.(wid,ist,rls,met/dya)

Terseret Konflik Iran-AS, Selat Malaka Penting?

NAMA Selat Malaka ikut terseret dalam eskalasi konflik Iran dan Amerika Serikat. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ali Akbar Velayati, menyebut jalur itu dalam pernyataannya di tengah ketegangan yang dipicu blokade Selat Hormuz.

"Era pemaksaan keamanan dari seberang lautan telah berakhir. Hari ini, bukan hanya keamanan Hormuz dan Malaka yang dijamin di bawah bayang-bayang kekuatan kami dan mitra strategis kami," ujarnya, seperti dikutip sejumlah laporan internasional.

Ia juga memperingatkan bahwa "setiap tindakan usil" dapat memicu respons berantai hingga ke Malaka dan Bab al-Mandab, menandakan meluasnya spektrum tekanan yang ingin ditunjukkan Teheran.

Namun, sejumlah analis menilai penyebutan Selat Malaka lebih sebagai sinyal politik ketimbang ancaman langsung. Iran dinilai tengah mengedepankan strategi tekanan ekonomi untuk menunjukkan daya ganggu terhadap sistem global. "Gagasannya bukan bahwa mereka akan menutup Selat Malaka, tetapi membingkai hal ini agar orang memahami bahwa harga dari melanjutkan kampanye akan lebih tinggi," kata analis Danny Citrinowicz.

Pandangan serupa datang dari peneliti Hu Bo yang menyebut kecil kemungkinan negara-negara pesisir mengambil langkah ekstrem seperti

di Hormuz. Selain itu, Selat Malaka memiliki jalur alternatif seperti Selat Sunda, Lombok, dan Ombai-Wetar, sehingga gangguan total dinilai lebih sulit terjadi.

Namun, apa sebenarnya Selat Malaka, dan mengapa jalur ini begitu penting?

"Selat Malaka sangat krusial karena merupakan jalur pelayaran terpendek dan paling efisien yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, sehingga menjadikannya rute yang tak tergantikan bagi perdagangan antara Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur," ujar Azifah Astrina, kandidat doktor di University of Illinois Urbana-Champaign, AS, sekaligus pakar kawasan yang menulis kajian tentang insiden maritim di Selat Malaka.

"Selat ini terhubung langsung dengan Laut China Selatan, yang dilalui sekitar sepertiga dari total perdagangan global," tambahnya.

Titik tersempit Selat Malaka, di sekitar Selat Phillips dekat Singapura, hanya memiliki lebar sekitar 2,8 kilometer.

Menurut laporan terbaru Badan Informasi Energi AS (US Energy Information Administration/EIA), sebanyak 23,2 juta barel minyak per hari melintasi Selat Malaka pada paruh pertama 2025—setara dengan sekitar 29% dari total perdagangan minyak global melalui laut.

Pada periode yang sama, jalur

DAFTAR JALUR PERDAGANGAN MINYAK TERSIBUK

Selat Malaka

- Volume: 23,2 juta barel/hari
- Kontribusi: 29,1% perdagangan global

Selat Hormuz

- Volume: 20,9 juta barel/hari
- Kontribusi: 26,2% perdagangan global

Cape of Good Hope

- Volume: 9,1 juta barel/hari
- Kontribusi: 11,4% perdagangan global

Terusan Suez & SUMED

- Volume: 4,9 juta barel/hari
- Kontribusi: 6,1% perdagangan global

Selat Denmark

- Volume: 4,9 juta barel/hari
- Kontribusi: 6,1% perdagangan global

Bab el-Mandeb

- Volume: 4,2 juta barel/hari
- Kontribusi: 5,3% perdagangan global

Selat Dardanelles

- Volume: 3,7 juta barel/hari
- Kontribusi: 4,6% perdagangan global

Terusan Panama

- Volume: 2,3 juta barel/hari
- Kontribusi: 2,9% perdagangan global



perairan ini juga menangani sekitar 260 juta meter kubik gas alam cair (LNG) per hari.

Gokcay Balci, dosen transportasi dan logistik angkutan berkelanjutan di University of Leeds, Inggris, mengatakan bahwa jalur perairan ini juga merupakan rute utama bagi pengiriman "barang elektronik, barang industri, mesin, dan mobil".

"Sekitar 25% perdagangan mobil dunia melintas melalui selat ini. Kargo curah kering, seperti gandum dan kedelai, juga melewati Selat Malaka," ujarnya.

Balci menambahkan: "Jika menggabungkan faktor geografis, ketergantungan energi, volume barang, serta keberagaman jenis muatan, Selat Malaka memiliki karakter yang berbeda dibandingkan Selat Hormuz.

Para pakar menilai arti penting Selat Malaka tidak hanya terletak pada bobot ekonominya, tetapi juga pada meningkatnya sensitivitas geopolitiknya.

"Setiap eskalasi ketegangan antara China dan Amerika Serikat, atau India, terkait dominasi maritim di kawasan ini berpotensi besar mengganggu lalu lintas di selat tersebut," ujar Balci.(gus,ist,bbc/dya)

PURBAYA 'BERSIH-BERSIH', DUA DIRJEN DICOPOT

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua pejabat eselon I Kementerian Keuangan, yakni Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu serta Direktur Jenderal Anggaran Lucky Alfirman. Keputusan itu berlaku efektif sejak Selasa, 21 April 2026, dan langsung diikuti penunjukan pelaksana harian (Plh) untuk mengisi kekosongan jabatan.

Purbaya menyatakan kedua pejabat tersebut untuk sementara tidak langsung mendapat penugasan baru. Ia masih



Febrio Nathan Kacaribu (kiri) dan Lucky Alfirman



Crystallin. Posisi itu kini dijalankan oleh Plh Herman Sheruddin. Masyita sendiri telah beralih tugas sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management sejak 11 Februari 2026.

Purbaya mengatakan pengisian tiga jabatan strategis tersebut akan diajukan sekaligus kepada Presiden Prabowo Subianto. "Nanti akan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekalian saya sebutkan awal Mei atau pertengahan Mei," katanya.

Langkah ini memicu spekulasi adanya perombakan kelompok lama di Kementerian Keuangan, mengingat Febrio dan Lucky merupakan pejabat yang diangkat pada era Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.

Febrio dikenal sebagai salah satu ekonom kunci di masa Sri Mulyani. Ia dilantik sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 23 Mei 2025, setelah sebelumnya menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal sejak April 2020. Lulusan SMA Taruna Nusantara itu juga pernah menjadi Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM).

Adapun Lucky Alfirman memulai karier eselon I pada 2017 sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang kebijakan penerimaan negara. Ia kemudian menempati sejumlah posisi strategis, termasuk Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, anggota ex-officio Dewan Komisiner LPS, serta Dirjen Perimbangan Keuangan. Pada Mei 2025, Sri Mulyani menunjuknya sebagai Dirjen Anggaran menggantikan Isa Rachmatarwata yang terseret kasus Jiwasraya.

Dengan perubahan ini, struktur pimpinan eselon I Kementerian Keuangan memasuki fase transisi, sembari menunggu keputusan Presiden atas usulan nama-nama baru yang akan diajukan dalam waktu dekat.

Purbaya juga menyebut bahwa nama-nama calon pengganti ketiga Dirjen tersebut akan diserahkan ke Presiden Prabowo Subiyanto pada awal hingga pertengahan Mei mendatang. Kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja merotasi 5 pejabat eselon II di lingkungan kementerian tersebut.

Sementara bulan lalu, sebanyak 1.585 pejabat Kementerian Keuangan, termasuk 44 pejabat pimpinan pratama eselon II dirotasi. (wis,ist,rla,tmo/dya)

mempertimbangkan posisi yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. "Belum, istirahat dulu. Masih mencari tempat yang pas untuk mereka," ujarnya.

"Iya. Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah kemarin soalnya, sekarang sudah aktif. Sudah ditandatangani kemarin siang," kata Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator

Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pencopotan ini menambah daftar kekosongan di level direktur jenderal. Selain dua posisi tersebut, jabatan Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi pejabat definitif setelah ditinggalkan Masyita

SIMULASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) MOBIL LISTRIK

Wuling Air EV

- DP PKB: Rp123,9 juta
- Estimasi PKB per Tahun: Rp2,47 juta

BYD Atto 1

- DP PKB: Rp115 juta
- Estimasi PKB per Tahun: Rp2,31 juta

J5 EV

- DP PKB: Rp208,95 juta
- Estimasi PKB per Tahun: Rp4,18 juta

BYD Seal

- DP PKB: Rp510 juta
- Estimasi PKB per Tahun: Rp10,20 juta



KEBIJAKAN fiskal pemerintah kembali menjadi sorotan setelah dua isu mencuat hampir bersamaan: rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jalan tol dan perubahan skema pajak kendaraan listrik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berada di tengah pusaran perdebatan, berupaya menjelaskan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari penataan sistem, bukan semata-mata penambahan beban baru.

Di satu sisi, pemerintah tengah mengkaji penerapan PPN pada jasa jalan tol. Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 itu dinilai memiliki dasar rasional dari sisi desain perpajakan. Ekonom dari CORE, Yusuf Rendy Manilet, melihat langkah ini sebagai upaya menciptakan netralitas pajak antar moda transportasi. "Kalau dilihat secara sederhana, rencana pengenaan PPN pada jasa jalan tol memang terlihat logis dari sisi desain

Sorotan Pajak

Kendaraan Listrik dan Jalan Tol

perpajakan. Ada argumen soal netralitas yakni moda transportasi lain dikenai pajak, sementara tol tidak," ujarnya.

Namun, rasionalitas desain itu tidak serta-merta menjamin dampak ekonomi yang ringan. Yusuf mengingatkan bahwa kontribusi kebijakan ini terhadap penerimaan negara relatif terbatas. Dengan estimasi pendapatan tol nasional di kisaran Rp 40-45 triliun per tahun, tambahan penerimaan dari PPN hanya sekitar Rp 4-5 triliun. "Dalam konteks APBN yang ukuran defisitnya ratusan triliun, ini bukan game changer," kata dia.

Dampak yang lebih terasa justru berpotensi muncul di sisi masyarakat, terutama kelas menengah. Menurut Yusuf, tambahan biaya yang tampak kecil per transaksi dapat terakumulasi dalam pengeluaran bulanan. "Tambahan biaya, meskipun terlihat kecil per transaksi, dalam sebulan bisa cukup terasa. Ini yang membuat dampaknya lebih terasa sebagai tekanan ke daya beli kelas menengah," ujarnya.

Efek berantai juga mengintai sektor logistik. Kenaikan biaya

operasional akibat pajak berpotensi diteruskan ke harga barang. "Biaya akan diteruskan ke harga barang. Artinya konsumen akhir yang menanggung, termasuk kelompok yang tidak pernah menggunakan tol sama sekali," kata Yusuf.

Pandangan senada disampaikan sejumlah ekonom lain. Mereka menilai kebijakan ini memang dapat memperluas basis pajak, tetapi berisiko kontraproduktif jika diterapkan dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Tekanan inflasi, kenaikan harga bahan bakar, serta melemahnya daya beli menjadi faktor yang memperbesar dampak kebijakan tersebut.

Ekonom INDEF, Esther Sri Astuti, memperkirakan potensi tambahan penerimaan negara dari PPN tol mencapai sekitar Rp 4,1 triliun. Namun, ia mengingatkan adanya risiko yang lebih luas. "Rencana pengenaan PPN 11 persen pada jasa jalan tol berpotensi meningkatkan penerimaan negara, namun berisiko memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan biaya logistik nasional," ujarnya. (wud ost/kum)